

ANALISIS POLA KONSUMSI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAN TAHUN 2013

Meity Ferdiana Paskual

pascoalmeity@gmail.com

Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research is categorised as descriptive quantitative. The results show that (1) Central Sulawesi Province has consumption patterns which are more likely in food consumption. The consumption patterns follow the Law of Engels where a decline in the percentage of food consumption on any increase in revenue. At the same time, the percentage of non-food consumption continues to rise. The largest component of household consumption in Central Sulawesi as follow: (i) housing and household facilities, (ii) various goods and services, (iii) grains, (iv) for foods and drinks, as well as (v) tobacco and betel. (2) According to the World Bank, the inequality of Central Sulawesi Province is categorised as low and moderate with Gini Ratio = 0.39. Therefore, it needs special attention by the government because the number of Gini Ratio is approaching the limit of high inequality. (3) The pattern of consumption in the districts or cities in Central Sulawesi Province can be distinguished as follow; the household spending in several regencies, such as, Banggai Islands, Poso, Donggala, Tolitoli, Buol, Parigi Moutong, Tojo Una-Una and Sigi are more likely to consume food. Meanwhile, the household spending in Palu, Morowali and Banggai Regencies are more likely to consume non-food consumption. However, the three regions have higher level of inequality compare to other areas. It is due to non-food consumption is dominated by high-income households.

Keywords: *Consumption, Inequality, Household, Central Sulawesi*

Sulawesi Tengah merupakan Provinsi yang meraih pertumbuhan ekonomi tertinggi ke dua di Indonesia setelah Papua (<http://m.liputan6.com>, 2014). BPS Provinsi Sulawesi Tengah mengumumkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2009 hingga Tahun 2013 mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB tersebut telah mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun PDRB hanya mencerminkan perkembangan produksi yang dihasilkan dan belum mencerminkan pembagian hasil kepada pemilik faktor produksi, sehingga perlu diiringi dengan data perkembangan jumlah penduduk.

Perekonomian seharusnya meningkatkan kesejahteraan (Stiglitz, dkk., 2010). Oleh karena itu tingkat kesejahteraan suatu daerah merupakan salah satu tolok ukur untuk

mengetahui keberhasilan pembangunan di daerah tersebut, dimana konsumsi serta distribusi pendapatan adalah salah satu penunjangnya (Rustiadi, dkk., 2011). Pedoman I Susenas Tahun 2003 mencantumkan pendapatan dan konsumsi masyarakat sebagai salah satu indikator kesejahteraan. Pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat Sulawesi Tengah yang semakin meningkat tentu mempengaruhi pola konsumsi masyarakatnya yang diharapkan semakin membaik. Teori Engel menyatakan bahwa: "Semakin tinggi tingkat pendapatan keluarga semakin rendah presentasi pengeluaran untuk konsumsi makanan" (Sumarwan, 1993).

Fakta bahwa Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke 2 di Indonesia Tahun 2013 serta pendapatan per kapita masyarakatnya yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, seharusnya memberikan gambaran kondisi konsumsi

masyarakat yang semakin membaik. BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 menyajikan data konsumsi pangan perkapita yang lebih besar dibanding konsumsi non pangan disaat pendapatan daerah meningkat dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. Namun komposisi konsumsi pangan sangat beragam. Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang pangan menyiratkan bahwa salah satu bentuk kesejahteraan melalui ketahanan pangan, bukan hanya terletak pada kebutuhan pangan yang tercukupi dalam hal kuantitas tetapi juga dari segi kualitas.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat pola konsumsi rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tengah secara lebih mendalam, terkait komponen pada pengeluaran untuk konsumsi pangan maupun konsumsi non pangan serta ketimpangan pendapatan rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tengah.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka rumusan pertanyaan pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola dan komponen konsumsi pada rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tengah?
2. Bagaimana ketimpangan pendapatan rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tengah?
3. Bagaimana pola konsumsi dan ketimpangan pendapatan rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah?

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisis deskriptif yakni metode yang diukur dengan menggunakan peralatan statistik kuantitatif baik statistik maupun non statistik atau dengan kata lain data yang dapat diukur dalam skala numerik/angka (Kuncoro, 2004).

Objek penelitian pada penelitian ini adalah pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi baik pangan maupun non pangan serta pendapatan (dari sisi pengeluaran) rumah tangga Provinsi

Sulawesi Tengah Tahun 2013. Penelitian ini melakukan kajian pada 5.818 rumah tangga se-Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan teknik penarikan sampel yang dilakukan oleh BPS Indonesia pada Susenas Tahun 2013.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yakni memperoleh data melalui dokumen - dokumen yang dipublikasikan oleh instansi-instansi terkait dengan penelitian ini. Data tersebut berupa data konsumsi dan pendapatan Rumah Tangga Tahun 2013 (*cross-section*).

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dimana peneliti menjabarkan pola konsumsi diperoleh dengan membandingkan pengeluaran konsumsi baik untuk pangan maupun non pangan dengan total konsumsi dikalikan dengan seratus persen. Peneliti menyesuaikan data dan melakukan agregasi pada 62.067 item data konsumsi pangan, 23.131 item data konsumsi non pangan dan 5.818 item data pendapatan untuk masing-masing Kabupaten/Kota maupun Provinsi secara keseluruhan sehingga menghasilkan data model yang dapat diolah menjadi tabel silang, grafik dan alat analisis lainnya sesuai kebutuhan penelitian.

Dalam mengukur ketimpangan, peneliti menggunakan koefisien Gini (*Gini Ratio*) dan Kriteria Bank Dunia sebagai alat ukur untuk masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi secara keseluruhan .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan rumah tangga sampel di Sulawesi Tengah berjumlah Rp.15.741.546.730,87 yang dialokasikan untuk konsumsi makanan dan non makanan. Berikut ini tabel yang menunjukkan alokasi pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi makanan dan non makanan:

Tabel 1. Konsumsi Rumah Tangga Sulawesi Tengah Tahun 2013

Konsumsi Makanan	Nilai (Rp)	Konsumsi non Makanan	Nilai (Rp)
padi-padian	1.568.569.813,20	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	3.274.444.838,65
umbi-umbian	140.299.409,44	Aneka Barang dan Jasa	2.624.559.717,95
ikan/udang/cumi/kerang	982.052.237,56	Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	554.450.157,83
Daging	144.847.585,63	Barang Tahan Lama	906.469.236,50
telur dan susu	340.324.899,96	Pajak dan Pungutan dan Asuransi	186.323.707,03
sayur-sayuran	672.421.598,32	Keperluan Pestadan Upacara/Kenduri	294.314.766,77
kacang-kacangan	124.620.673,38		
buah-buahan	353.489.563,71		
minyak dan lemak	284.337.398,47		
bahan minuman	369.959.520,75		
bumbu-bumbuan	168.691.907,14		
konsumsi lainnya	161.944.813,83		
makanan dan minuman jadi	1.502.256.316,57		
tembakau dan sirih	1.087.168.568,16		
Jumlah	7.900.984.306,12	Jumlah	7.840.562.424,75
Persentase	50,19%	Persentase	49,81%

Sumber: Susenas, data diolah

Data yang diperoleh juga menunjukkan beberapa komponen pengeluaran yang lebih dominan dikonsumsi bila dibandingkan dengan komponen konsumsi lainnya. Berikut

ini tabel yang menunjukkan komponen konsumsi serta persentase alokasi konsumsi terhadap total pengeluaran.

Tabel 2. Komponen Konsumsi Pangan dan Non Pangan Terhadap Total Pengeluaran

Jenis Pengeluaran	Konsumsi perbulan (Rp)	Persentase	Rank	Jumlah (Rp)
padi-padian	1.568.569.813,19	9,96	3	7.900.976.163,06
umbi-umbian	140.299.409,41	0,89		
ikan/udang/cumi/kerang	982.052.237,56	6,24		
Daging	144.847.585,63	0,92		
telur dan susu	340.320.614,25	2,16		
sayur-sayuran	672.464.884,04	4,27		
kacang-kacangan	124.573.530,50	0,79		
buah-buahan	353.489.563,71	2,25		
minyak dan lemak	284.337.398,47	1,81		
bahan minuman	369.959.520,75	2,35		
bumbu-bumbuan	168.691.907,14	1,07		
konsumsi lainnya	161.944.813,68	1,03		
makanan dan minuman jadi	1.502.256.316,57	9,54	4	
tembakau dan sirih	1.087.168.568,16	6,91	5	
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	3.274.444.838,65	20,80	1	7.840.563.627,75
Aneka Barang dan Jasa	2.624.559.717,95	16,67	2	
Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	554.450.157,83	3,52		
Barang Tahan Lama	906.469.236,50	5,76		

Pajak dan Pungutan dan Asuransi	186.324.910,03	1,18		
Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	294.314.766,77	1,87		
Total		100,00		15.741.539.790,80

Sumber: Susenas, data diolah

Terdapat 5 komponen konsumsi dengan nilai pengeluaran tertinggi yang terdiri dari 3 item konsumsi makanan dan 2 item konsumsi non makanan. Berikut ini 5 komponen konsumsi yang memiliki nilai pengeluaran tertinggi yakni: (1) Perumahan dan fasilitas

rumah tangga, (2) Aneka barang dan jasa, (3) Padi-padian, (4) Makanan dan minuman jadi, serta (5) Tembakau dan sirih.

Perhitungan gini rasio menghasilkan data seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Perhitungan Koefisien Gini Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013

Fi	Pendapatan	Σ Pendapatan				
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/ Σ (2)	(5)=(4)*(1)	(6)	(7)=(6)* Σ (2)
Q1	1	1.129.324.938,52	0,072	0,072	0,2	3.148.309.346
Q2	0,5	1.771.596.430,71	0,184	0,092	0,4	6.296.618.692
Q3	0,33	2.344.177.902,90	0,333	0,11	0,6	9.444.928.039
Q4	0,25	3.241.379.480,27	0,54	0,135	0,8	12.593.237.385
Q5	0,2	7.255.067.978,47	1,00	0,20	1,00	15.741.546.731
		15.741.546.730,87		0,61		

$$GC = 1 - 0,61 = 0,39$$

Sumber: Susenas, data diolah

Tabel di atas menunjukkan ketimpangan pendapatan rumah tangga Sulawesi Tengah yang berada pada kategori ketimpangan sedang dengan koefisien Gini = 0,39 yakni

berada di bawah batas koefisien ketimpangan tinggi 0,4. Ketimpangan juga dilakukan menggunakan Kriteria Bank Dunia dengan perhitungan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Ketimpangan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Kategori Kelompok	Kumulatif penduduk	Kumulatif Pendapatan	Proporsi Pendapatan	Persen (%)
40 % penduduk pendapatan rendah	2327	2.900.921.369,23	0,18428439	18,42844
40 % penduduk pendapatan sedang	2327	5.582.167.573,65	0,35461366	35,46137
20 % penduduk pendapatan tinggi	1164	7.258.457.787,99	0,46110194	46,11019
Jumlah	5818	15.741.546.730,87		100

Sumber: Susenas, data diolah

Berikut ini adalah rekapitulasi perhitungan Ketimpangan di Kabupaten/Kota

se-Sulawesi Tengah.

Tabel 5. Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah

KAB/KOTA	GINI RATIO	KRITERIA BANK DUNIA
Banggai Kepulauan	0,36	Ketimpangan sedang
		19,75%
		Ketimpangan rendah

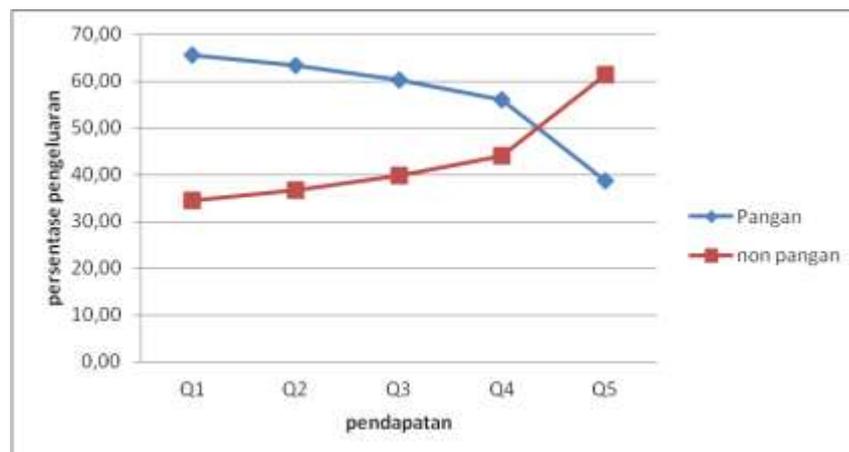
Banggai	0,38	Ketimpangan sedang	18,89%	Ketimpangan rendah
Morowali	0,406	Ketimpangan tinggi	17,31%	Ketimpangan rendah
Poso	0,34	Ketimpangan sedang	20,95%	Ketimpangan rendah
Donggala	0,3	Ketimpangan sedang	23,19%	Ketimpangan rendah
Tolitoli	0,345	Ketimpangan sedang	20,87%	Ketimpangan rendah
Buol	0,34	Ketimpangan sedang	21,10%	Ketimpangan rendah
Pariigi Moutong	0,33	Ketimpangan sedang	21,27%	Ketimpangan rendah
Tojo Una-una	0,33	Ketimpangan sedang	21,17%	Ketimpangan rendah
Sigi	0,38	Ketimpangan sedang	19,08%	Ketimpangan rendah
Palu	0,42	Ketimpangan Tinggi	16,46%	Ketimpangan sedang
Sulawesi Tengah	0,39	Ketimpangan Sedang	18,42 %	Ketimpangan rendah

Sumber : Data diolah

1. Pola dan Komponen Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Tengah

Pola konsumsi rumah tangga menunjukkan pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan dibanding non makanan yakni 50,19% dan 49,81%. Untuk melihat gambaran pola konsumsi, peneliti membagi data pendapatan dan konsumsi kedalam lima kelas pendapatan dan konsumsi sesuai dengan tingkatannya. Pendapatan yang

dihitung dari pendekatan pengeluaran pada 5.818 rumah tangga sampel di Provinsi Sulawesi Tengah ini berjumlah Rp.15.741.546.730,87. Pendapatan tersebut dialokasikan untuk konsumsi makanan dan non makanan. Berikut ini grafik yang menunjukkan aplikasi hukum Engels pada pola konsumsi rumah tangga Sulawesi Tengah:

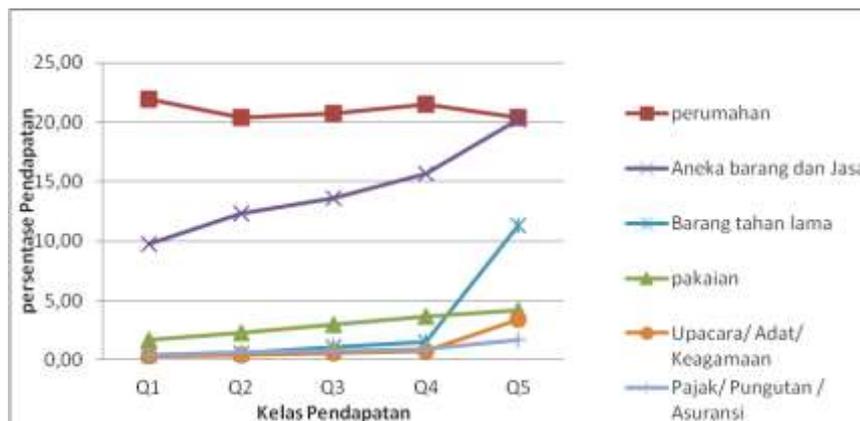


Sumber: Susenas, data diolah

Gambar 1. Pola konsumsi Makanan dan Non Makanan Rumah Tangga Sulawesi Tengah

Beberapa jenis konsumsi non makanan mengalami peningkatan persentase seiring dengan meningkatnya pendapatan, sedangkan yang lainnya relatif tetap. Berikut ini grafik

yang menunjukkan persentase pengeluaran non makanan terhadap setiap tingkatan pendapatan.



Sumber: Susenas, data diolah

Gambar 2. Pola Konsumsi Non Makanan Rumah Tangga Sulawesi Tengah

Berdasarkan data yang di peroleh, alokasi pengeluaran non makanan terbesar adalah konsumsi untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 41,76 %, aneka barang dan jasa sebesar 33,47 %, barang tahan lama sebesar 11,56 % dan sisanya untuk konsumsi pakaian, pajak/pungutan serta keperluan upacara (adat dan keagamaan).

Hasil olah data menunjukkan porsi pengeluaran untuk konsumsi perumahan relatif tetap. Artinya bahwa peningkatan pendapatan juga menyebabkan peningkatan konsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga dalam persentase yang relatif tetap terhadap peningkatan pendapatan. Hal yang sama juga terjadi pada konsumsi pakaian serta pengeluaran pajak/pungutan dan keperluan upacara adat/keagamaan yang mana alokasi pengeluaran relatif tetap pada setiap kelas pendapatan.

Padi-padian (beras) merupakan makanan pokok masyarakat Sulawesi Tengah, sehingga kebutuhan akan komoditas ini menjadi yang paling tinggi diantara komoditas makanan lainnya. Konsumsi terhadap makanan dan minuman jadi yang tinggi juga nampak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan di sektor perdagangan, hotel dan restoran. Tercatat PDRB di sektor perdagangan, hotel dan restoran dari tahun 2009 hingga Tahun 2013 terus meningkat (DDA-BPS, 2014). Hal ini menunjukkan perubahan pola konsumsi

makanan rumah tangga yang cenderung lebih praktis sebagai akibat dari tingginya aktivitas atau tingkat kesibukan maupun gaya hidup moderen.

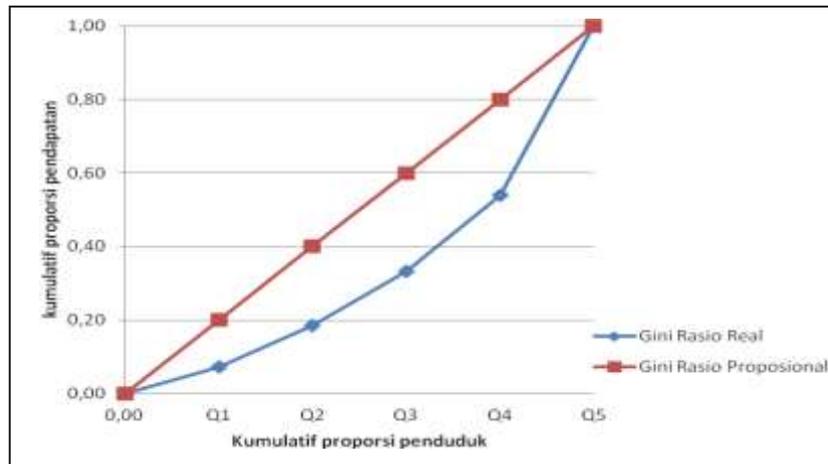
Selain itu, data tersebut di atas juga menunjukkan tingginya konsumsi rumah tangga terhadap rokok dan semacamnya. Meskipun berdampak negatif bagi kesehatan dan mendapat larangan di tempat-tempat tertentu, merokok masih menjadi aktivitas konsumsi masyarakat Sulawesi Tengah baik akibat dari kebiasaan, adat istiadat maupun gaya hidup.

Secara umum rumah tangga di Sulawesi Tengah masih memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi akan makanan sehingga pemenuhan kebutuhan tersebut perlu perhatian khusus, baik dari pihak pemerintah maupun swasta guna tercapainya ketahanan makanan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No.7 Tahun 1996.

Data yang menunjukkan tingginya pengeluaran terhadap konsumsi barang dan jasa memberikan gambaran bahwa rumah tangga Sulawesi Tengah juga telah mengalami peningkatan kualitas hidup melalui konsumsi barang dan jasa. Namun konsumsi non makanan yang besar itu masih didominasi oleh rumah tangga yang memiliki pendapatan tinggi.

2. Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Tengah

Hasil penelitian menunjukkan koefisien Gini 0,39 yang berada pada level ketimpangan sedang. Perhitungan koefisien Gini tersebut menghasilkan angka-angka yang membentuk Kurva Lorenzs. Angka-angka :



Sumber: Susenas, data diolah

Gambar 3. Kurva Lorenz Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013

Pengukuran ketimpangan lain yang digunakan yakni Kriteria Bank Dunia menunjukan Provinsi Sulawesi Tengah berada pada ketimpangan rendah karena 40% penduduk berpendapatan rendah memperoleh lebih dari 17% bagian dari pendapatan total. Perbedaan dalam penetapan kategori tingkat ketimpangan ini disebabkan karena perbedaan dalam ukuran penetapan ketimpangan itu sendiri.

Secara garis besar, kemiskinan terus mengalami tren yang menurun. Hal ini berarti bahwa penduduk golongan pendapatan bawah juga mengalami kenaikan kesejahteraan. Kesejahteraan yang diukur melalui konsumsi mengalami peningkatan pada semua golongan, baik golongan pendapatan bawah, menengah maupun golongan atas. Hanya saja golongan pendapatan bawah cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan golongan menengah keatas.

tersebut menggambarkan Ketimpangan pendapatan berupa garis cembung terhadap garis diagonal yakni garis pemerataan sempurna (proporsional) yang telah dikemukakan oleh Karl Max (Marxian Utopia). Berikut ini adalah kurva Lorenz yang menggambarkan Ketimpangan di Sulawesi Tengah

Sektor pertanian dan jasa menjadi sektor yang memberi kontribusi terbesar bagi PDRB Sulawesi Tengah. Tenaga kerja paling banyak terserap di sektor pertanian dan perkebunan, namun dengan status pekerja keluarga atau tidak dibayar (<http://www.sp2010.bps.go.id>). Banyaknya tenaga kerja yang menggantungkan hidup di sektor pertanian, dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan produksi yang meningkat lambat hanya menambah beban kehidupan para petani yang mempunyai lahan dan menambah jumlah deretan petani "tuna tanah" (Booth dan Sumdrum, 1982).

Belum lagi sektor jasa dengan investasi moderen yang menitikberatkan sistem perekrutan tenaga kerja yang *high qualification*. Hanya tenaga kerja dengan pendidikan, keterampilan dan kesehatan yang baiklah yang akan berpotensi memiliki pendapatan tinggi. Dengan demikian, golongan pendapatan tinggi yang semakin

kaya menjadi tidak terelakan. Meskipun demikian, bukan berarti golongan miskin semakin miskin. dalam arti kebendaan, sebagian besar penduduk mengalami perbaikan taraf hidup sampai pada derajat tertentu (Arndt, 1983). Namun yang pasti, ketidakmerataan distribusi pendapatan masih terus berlangsung sampai saat ini.

Pertumbuhan konsumsi yang lebih tinggi pada golongan menengah keatas dibanding pada golongan bawah juga disebabkan oleh kenaikan harga komoditas serta struktur ekonomi yang lebih bias ke sektor pertambangan, jasa-jasa dan keuangan (*financial*) yang mana sektor-sektor tersebut banyak dinikmati oleh golongan pendapatan menengah keatas.

Konsep lain mengenai Ketimpangan oleh J. Roemer (1998) yang juga menjadi acuan Bappenas (2012) mengatakan bahwa tingginya Ketimpangan (ataupun tren perubahannya) dalam sebuah masyarakat disebabkan oleh :

1. Ketimpangan dalam usaha, kerja keras, atau talent dari individu
2. Ketimpangan dalam kesempatan (*opportunity*)
3. Kebijakan

Bappenas (2012) mencatat bahwa fokus pemerintah adalah meningkatkan *equality of opportunity* dan redistribusi. Retribusi dilakukan melalui sistem perpajakan yang progresif, dimana penerimaan pajak digunakan untuk melindungi mereka yang kurang beruntung. Sedangkan peningkatan *equality of opportunity* dilakukan agar semua warga Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan nya melalui *equality of opportunity* dalam pendidikan semua jenjang serta kualitas pelayanan kesehatan.

Konsep ini dapat menjadi acuan dalam mengatasi masalah Ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah. Peningkatan pendapatan daerah, pendapatan perkapita dan konsumsi rumah tangga memang secara umum menggambarkan peningkatan

kesejahteraan. Namun masalah ketimpangan tidak dapat dikesampingkan begitu saja, mengingat tujuan pembangunan adalah *growth, equity, sustainability* (Rustiadi, dkk., 2011).

3. Pola Konsumsi dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah

Persentase konsumsi makanan terbesar berturut-turut adalah Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Kab. Morowali, Kab. Tojo Una-una, Kab. Sigi, Kab. Poso, Kab. Banggai, Kab. Toli-toli, Kab. Buol, Kab. Donggala dan Kab. Banggai Kepulauan. Jenis komponen makanan yang paling besar dikonsumsi hampir disetiap daerah adalah padi-padian.

Khusus untuk Kota Palu, Kab. Tojo Una-una dan Kab. Poso, jenis makanan yang paling besar dikonsumsi adalah makanan dan minuman jadi. Selain gaya hidup, tingginya konsumsi terhadap makanan dan minuman jadi di beberapa daerah tersebut juga menunjukkan tingkat mobilitas yang tinggi. Hal ini didukung oleh data penduduk bekerja didaerah tersebut yang berada di atas rata-rata penduduk bekerja di kabupaten lainnya (Sakernas, 2013 dalam DDA-BPS Sulteng, 2014).

Kota Palu dan Kab. Morowali merupakan daerah dengan kontribusi terbesar pengeluaran non makanan untuk jenis barang tahan lama yang mencakup kendaraan, perhiasan dan barang mewah lainnya termasuk perawatannya. Barang-barang mewah tersebut tentu dikenakan pajak. Harga yang mahal juga memungkinkan untuk membelinya dengan cara kredit (angsuran). Oleh karena itu, konsumsi non makanan jenis pajak, pungutan dan angsuran di daerah tersebut memiliki kontribusi yang tinggi terhadap total pengeluaran Sulawesi Tengah.

Adapun komponen yang memiliki nilai pengeluaran tertinggi pada rumah tangga di Kota Palu yakni: (1) Perumahan dan fasilitas rumah tangga, (2) Aneka barang dan jasa, (3)

Makanan dan minuman jadi, dan (4) Barang tahan lama.

Pengeluaran rumah tangga terhadap komponen-komponen konsumsi tersebut sebagian besar di dominasi oleh rumah tangga dengan pendapatan yang tinggi. Pola konsumsi menunjukkan tingkat kebutuhan rumah tangga terhadap makanan maupun non makanan. Pengeluaran yang tinggi terhadap konsumsi non makanan memang menunjukkan perbaikan kualitas hidup rumah tangga di beberapa daerah di Sulawesi Tengah. Namun yang juga perlu menjadi perhatian adalah

masalah ketimpangan untuk menunjang tinjauan terhadap peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Pada beberapa daerah, pola konsumsi yang cenderung pada konsumsi non makanan seharusnya menunjukkan perbaikan kualitas hidup, namun kenyataannya ini hanya dinikmati oleh rumah tangga pada kelas pendapatan tinggi. Berikut ini tabel yang menunjukkan pola konsumsi dan Ketimpangan berdasarkan peringkat dari Ketimpangan tertinggi hingga yang terendah.

Tabel 6. Pola konsumsi, Pendapatan Perkapita dan Urutan Ketimpangan Kabupaten/Kota

Kab/kota	Pola konsumsi (%)		Pendapatan (rumah tangga perbulan)	Ketimpangan (rank)
	Makanan	Non Makanan		
Banggai Kepulauan	55,77	44,23	Rp.2.001.775	5
Banggai	46,32	53,68	Rp.2.563.252	3
Morowali	48,97	51,03	Rp.3.187.290	2
Poso	50,86	49,14	Rp.2.773.483	7
Donggala	59,75	40,25	Rp.1.765.691	11
Tolitoli	54,19	45,81	Rp.2.237.023	6
Buol	54,46	45,54	Rp.2.374.897	8
Parigi Moutong	54,44	45,56	Rp.2.569.158	10
Tojo Una-una	56,86	43,14	Rp.2.571.309	9
Sigi	53,52	46,48	Rp.2.336.517	4
Palu	38,10	61,90	Rp.5.121.434	1
Sulawesi Tengah	50,19 %	49,81%	Rp.2.705.662,90	-

Sumber : Susenas, data diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Palu menjadi daerah dengan pola konsumsi non makanan yang tinggi serta pendapatan paling tinggi, namun juga menjadi daerah yang pendapatan rumah tangganya paling timpang. Sebagaimana dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibanding ketimpangan di pedesaan. Namun demikian, ketimpangan tetap ada, baik di desa maupun di kota.

Daerah pedesaan dengan ketimpangan tinggi adalah Kabupaten Morowali yang

perekonomiannya didorong oleh sektor pertanian dan pertambangan (<http://www.morowalikab.bps.go.id>).

Sebagaimana Penelitian Anne Booth dan Sundrum (1982) yang mencatat bahwa ketimpangan di desa disebabkan beberapa hal penting menyangkut: (1) distribusi faktor produksi (lahan) yang sebagian besar dikuasai oleh petani besar, swasta dan pemerintah, (2) pertumbuhan penduduk di sektor pertanian yang tinggi sehingga memicu tingginya angka "tuna tanah", (3) sistem tenaga kerja dan upah tradisional yang beralih pada tenaga kerja

dengan penguasaan alat, serta (4) produksi sektor perkebunan rakyat (karet, teh dan gula) meningkat lebih lambat dibanding perkebunan besar dan nilai tukar palawija yang meningkat lebih cepat dibanding beras.

Hasil penelitian tersebut didukung oleh data sensus penduduk Tahun 2010 Kabupaten Morowali yang menunjukkan tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian dan perkebunan paling banyak merupakan pekerja keluarga atau tidak dibayar. Adapun sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor usaha yang memerlukan tingkat keterampilan yang tinggi (*High Skill*) sehingga para tenaga kerja mengalami seleksi yang sangat ketat dengan tingkat persaingan yang tinggi.

Perekonomian Kota Palu paling besar di dorong oleh sektor jasa (*services*) serta sektor perdagangan, hotel dan restoran (<http://www.palukota.bps.go.id>). Pada sektor ini, kesempatan kerja terbuka bagi golongan profesional dan administratif (A. Booth dan Sundrum, 1982) dengan tingkat pendidikan yang tinggi, baik di pemerintahan (PNS) maupun swasta. Data BPS menunjukkan penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut adalah sebagai buruh atau karyawan atau tenaga kerja (<http://www.sp2010.bps.go.id>). Selain itu, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan investasi moderen yang *high qualification* menambah parah ketidakmerataan pendapatan di perkotaan.

Makna peningkatan konsumsi, peningkatan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan menjadi sedikit terganggu manakala Ketimpangan yang dirasakan masih cukup tinggi. Oleh karena itu penting untuk menjadi perhatian semua *stakeholders* untuk dapat menciptakan pembangunan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan (*growth*), tetapi juga pemerataan (*equality*) dan keberlanjutan (*sustainable*).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki pola konsumsi yang lebih cenderung pada konsumsi makanan dengan persentase 50,19% dan 49,81% untuk konsumsi non makanan. Hukum Engel yang menggambarkan pola konsumsi di Sulawesi Tengah menunjukkan persentasi pengeluaran makanan yang menurun pada setiap peningkatan pendapatan serta persentase konsumsi non makanan yang meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Adapun komponen konsumsi rumah tangga terbesar di Sulawesi Tengah berturut-turut adalah: (1) perumahan dan fasilitas rumah tangga, (2) Aneka barang dan jasa, (3) Padi-padian, (4) makanan dan minuman jadi, serta (5) tembakau dan sirih.
2. Secara umum, Provinsi Sulawesi Tengah berada pada Ketimpangan sedang dengan koefisien gini 0,39 dan berada pada level ketimpangan rendah menurut Kriteria Bank Dunia.
3. Pola konsumsi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Poso, Kab. Donggala, Kab. Tolitoli, Kab. Buol, Kab. Parigi Moutong, Kab. Tojo Una-una dan Kab. Sigi lebih cenderung untuk konsumsi makanan sedangkan pengeluaran rumah tangga Kota Palu, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai lebih cenderung untuk konsumsi non makanan. Namun demikian, ketiga daerah tersebut berada pada tingkat ketimpangan yang relatif lebih tinggi dibanding daerah lainnya.

Saran

1. Secara umum Provinsi Sulawesi Tengah masih berada pada level ketimpangan sedang, namun angka koefisien gini yang mendekati batas ketimpangan tinggi perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menekan angka ketimpangan tersebut

dengan menciptakan peluang-peluang dalam meningkatkan usaha, kerja keras dan mengasah talenta individu secara lebih merata.

2. Penyelenggaraan pembangunan pada daerah-daerah terdeteksi memiliki ketimpangan yang relatif tinggi diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi tetapi juga perlu memperhatikan aspek pemerataan pada setiap kebijakannya. Selain itu, pengurangan angka kemiskinan memang penting, tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemerataan distribusi hasil-hasil pembangunan melalui kebijakan yang memberi subsidi bagi kebutuhan dasar penduduk miskin serta kebijakan dalam redistribusi tanah/modal bagi tenaga kerja di sektor-sektor penyangga perekonomian rakyat, berikut ketersediaan akses bagi pendidikan, keterampilan, teknologi dan kesehatan serta kesempatan kerja.
3. Dengan adanya informasi terhadap kebutuhan konsumsi baik pangan dan non pangan tersebut, seluruh pelaku ekonomi diharapkan dapat ikut serta dalam proses produksi dan distribusi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dengan harga yang stabil, adil dan berpihak pada kepentingan umum.
4. Bagi penelitian selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk melihat tren pada pola konsumsi dan ketimpangan dengan menggunakan data *time series*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Eko Jokolelono, S.E.,M.Si., selaku Ketua Tim Pembimbing dan Bapak Dr. Mohammad Ichwan, S.E., M.Kes., selaku Anggota Tim Pembimbing, yang telah mencurahkan waktu, perhatian, bimbingan dan arahan kepada

penulis sejak perencanaan penelitian sampai penulisan tesis ini selesai.

DAFTAR RUJUKAN

- Arndt, H.W. 1983. *Pembangunan dan Pemerataan- Indonesia di Masa Orde Baru*. LP3ES. Indonesia
- Booth, Anne. Dan R.M Sundrum. 1982. *Ekonomi Orde Baru*. LP3ES. Indonesia
- Kuncoro, M. 2004. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Rustiadi, Saefulhakim dan Panuju. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Edisi Kedua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Stiglitz, J.E, dkk. 2010. *Mengukur Kesejahteraan*. Terjemahan Mutiara Arumsari dan Fitri B. Timur. 2011. Banten. Marjin Kiri.
- Sumarwan. 1993. *Keluarga Masa Depan dan Perubahan Pola Konsumsi*. Warta Demografi. Jakarta:LD.FEUI
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2012. *Kajian Rasio Gini di Indonesia Dalam Lima Tahun Terakhir (2007-2011)*.
- BPS Provinsi Sulawesi Tengah. 2014. *Sulawesi Tengah Dalam Angka*.
<http://m.liputan6.com> (30/1/2015)
[http:// palukota.bps.go.id/](http://palukota.bps.go.id/) (5/6/2015)
[http:// morowalikab.bps.go.id/](http://morowalikab.bps.go.id/) (5/6/2015)
[http:// sp2010.bps.go.id/](http://sp2010.bps.go.id/) (5/6/2015)